

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MANGKUBUMI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Andri Mulyana¹, Firda Siti², Putri Sarah R.A³, Dandi N⁴, Husnul H.M⁵,
Asep Nurdin Rosihan Anwar⁶

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}
E-mail: and26ri@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan desa merupakan penyedia pelayanan utama kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting. Perubahan peraturan perundangan-undangan membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government. Penelitian ini dilakukan di desa Mangkubumi untuk dengan tujuan untuk mengimplementasikan e-government dalam tata kelola pemerintah desa mangkubumi, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci: *Tata Kelola Pemerintahan, E-Government, dan Teknologi Informasi*

ABSTRACT

Village administration is the main service provider to the community and has a very important role. Changes in laws and regulations have implications for the readiness of village officials in service and community development through the use of information and communication technology or e-government. This research was conducted in Mangkubumi village for the purpose of implementing e-government in Mangkubumi village governance, this study used a qualitative descriptive method with data collection techniques by observation, interviews and documentation.

Keywords: *Governance, E-Government, and Information Technology*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan di tingkat desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakatnya berbasis *electronic government/e-government* (teknologi informasi pemerintahan). Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat agar tercipta desa yang mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Desa mandiri merupakan cerminan masyarakat

desa yang memiliki kemauan yang kuat untuk maju, menghasilkan produk yang memiliki kekhasan desa/lokal yang membanggakan desa, serta desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemandirian desa dapat dicirikan dengan melihat kemajuan pada infrastruktur, bidang sosial, ekonomi dan budayanya. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan kesiapan dari semua pihak serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good governance*). *Good governance* menurut UNDP (1997) secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan

bertanggungjawab. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan prinsip-prinsipnya pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara keseluruhan serta menghimpun kekuatan kearifan lokalnya.

Richard Heeks (2006: 4) menjelaskan: *“To understand e- government, we must therefore understand IT. What does IT do: it handles data to produce information The next step to understanding e- government, then, is to understand that egovernment systems are information systems At their heart lie data and information (the latter being defined as data that has been processed to make it useful to a recipient). These are handled by digital (and sometimes non-digital) information technologies”*. Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidak efisienan, terutama di negara yang sedang berkembang. Sesuai dengan solusi *e- government* yang dikemukakan oleh Backus dalam Palvia dan Sharma (2007), terdapat tiga tahap solusi *egovernment*, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi suatu pendukung yang sangat besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sekaligus menjalankan kegiatan KKN-T di Desa Mangkubumi. Desa

mangkubumi merupakan salah satu desa di Kabupaten Ciamis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan dan kemandirian desa. Dalam mewujudkan desa mandiri berbasis *e-government* mahasiswa KK- T Unigal bersama pemerintah desa berkolaborasi dan mengonsenkan kepada pelayanan *e-government* dan tata kelola SID. Tujuannya antara lain menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Penelitian ini berfokus pada tata kelola pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat agar terwujud *good governance*.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e- government*) masih mengalami masalah, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta hambatan regulasi dalam penyelenggaraan sistem informasi desa tersebut. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa (Praditya 2014).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini berkaitan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola

Pemerintahan Desa. Sumber data (subjek penelitian) diambil secara purposive sampling. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 3 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Keuang (Admin Website Desa). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut.

Prosedur kerja

Prosedur kerja adalah urutan-urutan yang telah dibuat dalam melakukan suatu pekerjaan dimana terdapat tahapan demi tahapan yang harus dilalui sehingga terlihat jelas adanya aturan yang harus ditaati oleh orang yang akan menjalankan prosedur kerja pada bidang tugas yang telah mereka kerjakan dan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan dipahami.

Komunikasi dengan beberapa stakeholder merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan berbasis *e-government* terutama dengan pihak pemerintahan desa mangkubumi. Berdasarkan pengamatan di desa mangkubumi teridentifikasi beberapa kelemahan dalam mewujudkan pelayanan berbasis *e-governmen* diantaranya fasilitas serta SDM baik dari penyelenggara maupun yang menerima pelayanan.

Kemudahan akses serta pensosialisasian ke masyarakat sangat perlu untuk mewujudkan pelayanan berbasis *e-governmen*, mayoritas penduduk desa mangkubumi sebagai petani dan jauhnya pemahaman digitalisasi mengharuskan masifnya sosialisasi kepada semua masyarakat. Dan untuk mempermudah akses pelayanan segala sesuatu bentuk informasi maupun pelayanan di dalam satu platform SID yaitu di dalam website desa.

Untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan masyarakat tinggal mengklik <https://mangkubumi.desa.id> maka akan muncul menu informasi dan pelayanan selain itu ada juga kontak person untuk memudahkan informasi.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan

Mitra menyediakan tempat serta subjek yaitu website desa yang akan disempurnakan sekaligus mempersiapkan bahan baik itu secara administrasi surat maupun informasi yang akan di publikasi di website desa, selain itu mitra juga menyiapkan SDM yang akan melanjutkan dan menyelaraskan SID di desa mangkubumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa secara otomatis menuntut perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mangkubumi, unsur penyelenggara Pemerintahan Desa hanya terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, tanpa posisi Badan Permusyawaratan Desa. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Mangkubumi perlu meningkatkan kapasitas kemampuan Perangkat Desa, karena adaptasi atau penyesuaian dengan Undang-Undang yang baru tidak mudah serta kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) Perangkat Desa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Dukungan pemerintah dalam memberikan penyediaan fasilitas dan pelatihan untuk proses pelayanan administrasi berbasis website. *E-government* sistem informasi pemberdayaan pemerintah dan potensi Desa berbasis web di pemerintah Desa Mangkubumi. Penggunaan TIK juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kedudukan suatu bangsa/negara.

Penguasaan TIK menjadi salah satu faktor yang mendukung penguasaan negara terhadap aset dan potensi yang mereka miliki. Setiap wilayah/desa memiliki potensi yang

unik dan beragam. Potensi desa dapat berupa produk unggulan maupun potensi pariwisata yang dapat meningkatkan daerah tersebut. Informasi yang lengkap terkait dengan potensi desa akan membantu investor dalam mengenal potensi dan iklim investasi yang ada di desa tersebut (Hartono & Mulyanto, 2010). Potensi desa harus dapat dikenal oleh masyarakat umum. Berbagai upaya dilakukan untuk memasarkan potensi desa yang dimiliki oleh masing-masing desa. Pemasaran memiliki orientasi kepada konsumen sehingga strategi pemasaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Salah satunya adalah mengembangkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penggunaan Teknologi Informasi untuk mempublikasikan potensi desa telah dilakukan pada beberapa desa. Teknologi Informasi membantu melakukan publikasi tersebut dengan pembangunan web profil di masing-masing desa. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan (Wahyuningrum & Januarita, 2014). (Halim Budi Santoso dkk, 2019).

Desa Mangkubumi sebagai salah satu desa mandiri di Kabupaten Ciamis yang memiliki visi mangkubumi TERBAIK dan mampu menjadi desa digital dalam menyampaikan informasi secara digitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan/*e-government* di Desa Mangkubumi dilakukan secara bertahap, karena sebaik apapun perubahan akan menimbulkan reaksi mulai dari sekedar meragukan efektivitasnya sampai pada penolakan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi tersembunyi (*vested interest*) yang bertentangan dengan tujuan perubahan tersebut. Menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan tersebut, maka pada awal pemanfaatan *e-government* di Desa Mangkubumi digunakan untuk

menyebarkan (diseminasi) informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, promosi dunia usaha melalui situs web sebatas berita kegiatan atau media promosi mengenai hasil bumi, lokasi wisata, penyelenggaraan festival seni budaya, serta hasil kerajinan (UKM), dan sebagainya. Dari sisi informasi hal tersebut sudah cukup lengkap dan informatif, namun perlu dikembangkan fasilitas yang mendukung komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha (G-to-B). Menurut informan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah desa mangkubumi pada awalnya hanya digunakan untuk mendukung kegiatan perangkat desa dalam kegiatan promosi produk unggulan dan produk pariwisata. Tetapi belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan programnya.

Mengacu pada teori solusi konsep *e-government* dari Backus, pelaksanaan pelayanan public di Desa Mangkubumi baru sampai pada tahap pertama dan kedua, tahap informasi dan tahap interaksi. Pada tahap informasi, pemerintah Desa Mangkubumi menyediakan website yang digunakan untuk mempublikasikan informasi desa dan pelayanan kependudukan. Sedangkan tahap interaksi baru sampai pada tataran masyarakat bisa memberikan *feedback*/timbal balik kepada pemerintah desa melalui website atau *contact person* perangkat desa. Untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif pemerintah desa mangkubumi belum bisa berinteraksi secara interaktif karena keterbatasan sumber daya manusia dan faktor pendukung lainnya terutama faktor kesiapan teknologi informasinya. Sampai saat ini pemerintah desa mangkubumi belum memiliki basis data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem informasi desa. Untuk itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung sistem tata kelola sumber daya desa.

Pemerintah desa juga belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data di desa sehingga pelaporan disajikan banyak berdasarkan asumsi semata.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Mangkubumi bukan hanya dari keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem informasi desa saja, tetapi juga kendala penerimaan dari masyarakat terhadap perubahan *culture* birokrasi. Biasanya birokrasi yang dilakukan bersifat tertutup, tetapi dengan menggunakan teknologi informasi maka transparansi atau keterbukaan informasi menjadi satu keharusan.

KESIMPULAN

Tuntutan perkembangan teknologi dan aturan perundang-undangan memaksa pelaksanaan pemerintahan di desa mengubah pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (sistem informasi desa). Selama ini pemerintah desa melakukan pelayanan publik secara manual dan belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data sehingga waktu yang diperlukan pun menjadi lebih lama. Pemerintahan desa mangkubumi telah memanfaatkan teknologi informasi sejak belum berlakunya UU No. 6 tentang Desa atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui situs web. Walaupun demikian, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi /*e-governance* (penggunaan aplikasi) khususnya untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat. Selama perjalanannya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi di Desa Mangkubumi baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil tahap interaktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan fasilitas teknologi informasi, masalah kapasitas sumber daya manusia baik dalam pemerintahan maupun

masyarakatdesa sebagai pengguna layanan masyarakat tersebut. Oleh karenanya interaksi dan sinergi yang efektif dan optimal sangat diperlukan, hal ini hanya dimungkinkan dengan diterapkannya *e-Governance* secara optimal. Sebagai konsep aplikatif, *egovernance* memang menawarkan alternatif strategi mengubah pola kerja dan perilaku birokrasi. Hambatan utama yang paling banyak terjadi adalah *good will* dari pemerintah daerah untuk menerapkan *egovernance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachus, Michiel, *E-governance in Developing Countries*, IICD Research Brief No.1, March, 2001.
- Maleong, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Muluk, M.R. Khairul, 2001. *Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, SushilS. (2007). *E-Government and E-Governance: Definitions/ Domain Framework and Status around the World*. Di dalam Agarwal, Ashok, et al (eds). *Foundations of E-government*. 5TH International Conference On EGovernance. Hyderabad, hal. 1-12.
- Praditya, Didit (BPPKI. 2014). "*The Utilization Of Information And Communication Technology (Ict) By Government InRural Level*." (88): 129-40.
- Richard Heeks, 2006. *Implementing and Managing E-Government* Sage Publication Limited, London: 2006, p. 4.
- Riley, Thomas B. 2002. *Change Management, EGovernance, and The Relationship to E-Government*, Commonwealth Centre for Electronic Governance,
- Perundangan :**
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.